

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Penelitian ini berangkat dari pijakan awal yang menitikberatkan pada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mengesankan dengan capaian 4 sampai 6 persen selama 10 tahun terakhir, lebih stabil daripada ekonomi Brasil, Rusia, India, dan China, atau negara maju lainnya. World Economic Forum menempatkan Indonesia 25 dari 139 negara untuk stabilitas ekonomi makro pada 2012, naik tajam dari 89 di tahun 2007. Sebagai perbandingan, Brasil peringkat ke-62 dan India peringkat ke-99.¹ Keberhasilan ekonomi makro ini pun tidak lepas dari adanya kebijakan ekonomi neoliberal yang dilakukan oleh pemerintah.

Neoliberalisme menjadi 'isme' yang dinisbatkan kepada SBY melalui program-programnya yang pro pasar bebas dan pragmatisme ekonomi. Meskipun keberadaannya (neoliberalisme) telah lama masuk sejak pemerintahan Soeharto. Neoliberalisme pernah menjadi batu sandungan SBY pada pemilu tahun 2009 karena isu ini dianggap sebagai sebuah ancaman bagi kedaulatan ekonomi Indonesia. Mengingat pada waktu itu SBY disandingkan dengan Boediono yang notabene

¹ Richard Dobbs, Fraser Thompson, Arief Budiman, *5 Reasons to Believe in the Indonesian Miracle*, diakses dari [http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/21/5_reasons_to_believe_in_the_indonesian_miracle? page=0,0](http://www.foreignpolicy.com/articles/2012/09/21/5_reasons_to_believe_in_the_indonesian_miracle?page=0,0), pada tanggal 25 April 2013.

dianggap sebagian pengamat sebagai seorang pemikir ekonom neoliberal. Dalam kabinet pemerintahannya SBY juga menempatkan dua ekonom neoliberal lainnya yakni Miranda Goeltom (Gubernur BI) dan Sri Mulyani (Menteri Keuangan).

Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme erat kaitannya dengan pembukaan pasar luar negeri melalui cara-cara politis, menggunakan tekanan ekonomi, diplomasi, dan/atau intervensi militer. Pembukaan pasar merujuk pada perdagangan bebas. Apa jadinya ketika sebuah paham yang tidak diyakini secara ideologi dalam falsafah kehidupan berbangsa di Indonesia ini memberi ruang pengaruh cukup besar dalam dinamika politik luar negeri Indonesia?

Dalam sebuah tulisan di media online Tempo², penulis membaca pernyataan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa yang menjabarkan 9 Refleksi Kementerian Luar Negeri. Dalam 9 butir refleksi itu setidaknya 5 butir diantaranya bersinggungan erat dengan peran sentral Neoliberalisme dalam hal penguatan ekonomi dan pembangunan. Kelima butir tersebut adalah, yang pertama, mempertajam prioritas kerja sama bilateral dengan mitra strategis dan negara sahabat dalam meningkatkan ketahanan pangan, energi, pertahanan, kesehatan, dan lingkungan hidup. Kedua, diplomasi ekonomi yang diarahkan pada konsolidasi pasar tradisional dan perluasan pasar non-tradisional. diplomasi ekonomi dilanjutkan untuk mencari peluang dan penetrasi pasar non-tradisional dan mempertajam peluang pasar

² Diakses dari <http://www.tempo.co/read/news/2013/01/04/078452173/9-Refleksi-Kementerian-Luar-Negeri>, pada tanggal 25 April 2013

tradisional, khususnya dengan mitra strategis. Ketiga, memperkuat ketahanan dan pertumbuhan ekonomi di kawasan yang kuat, berkelanjutan, dan inklusif. Keempat, Pembentukan tatanan ekonomi masa depan dengan mendorong penyelesaian *score card* pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN. Kelima, ikut mendorong tatanan ekonomi dan pembangunan dunia yang berkeadilan. Indonesia memikul tanggung jawab khusus terkait dengan isu agenda pembangunan global. Dalam hal ini, Presiden SBY bersama dengan Presiden Liberia dan PM Inggris telah dipilih menjadi pemimpin bersama High-level Panel of Eminent Persons on the Post-2015 Development Agenda yang akan memberikan masukan kepada Sekjen PBB mengenai agenda pembangunan global setelah 2015.

Presiden SBY dianggap telah memantapkan posisi Indonesia sebagai negara korporatokrasi melalui prinsip ekonomi neoliberalisme. Hal ini diakui SBY melalui *masterplan* kebijakan ekonomi pemerintahannya yang berkaitan dengan investasi bisnis dan pembangunan ekonomi skala menengah dan skala besar. Selain itu kebijakan melanjutkan utang luar negeri merupakan ciri dan pintu masuk dari neoliberal. negara-negara kreditor dapat dengan mudah masuk dan mengintervensi serta mencampuri urusan perekonomian Indonesia³.

Arah kebijakan politik luar Negeri yang cenderung pada kepentingan percepatan pertumbuhan ekonomi, investasi dan pembangunan dengan sedikit

³ Rizal Ramli dalam dialog Interaktif di gedung DPD RI Jakarta, dikutip dari http://www.mediaindonesia.com/webtorial/electionupdate/?ar_id=NDg5MQ diakses 11 April 2013.

mengesampingkan isu-isu terkait HAM, perdamaian, membuat nalar berpikir penulis untuk bisa mengkajinya lebih komprehensif.

Tanpa melihat siapa yang salah dan dipersalahkan atau mungkin mencoba mencari sebuah pembenaran dari fenomena ini, maka pijakan pemikiran peneliti mencoba mendeskripsikan sejauh mana neoliberalisme berpengaruh mengisi ruang-ruang dramatika modern bangsa ini. Berangkat dari sebuah skeptisme ini maka kemudian memantik nalar keingintahuan penulis untuk menjadikan **“PENGARUH NEOLIBERALISME TERHADAP ARAH KEBIJAKAN POLITIK LUAR NEGERI INDONESIA DI ERA PEMERINTAHAN PRESIDEN SUSILO BAMBANG YUDHOYONO”** sebagai judul skripsi.

B. Tujuan Penelitian

Penelitian ilmiah dalam konteks ilmu politik dan sosial tidak lepas dari etika objektivitas dalam memproduksi sebuah wacana empiris. Pemahaman situasi dan kondisi yang benar terjadi selalu memiliki alasan kuat untuk dijadikan sebagai bahan kajian penelitian. Oleh karenanya dalam mengkaji kajian ilmiah ini, penulis berusaha untuk memahami ketidakjelasan dalam ranah abu-abu tentang sebuah eksistensi dan kedigdayaan rezim penguasa. Sebagai sebuah perangkat keilmuan, penelitian ini bertujuan untuk ;

Mendeskripsikan pengaruh neoliberalisme terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

C. Latar Belakang Permasalahan

Berakhimya era kolonialisme, dunia memasuki era 'neokolonialisme,' dimana modus dominasi dan penjajahan tidak lagi fisik dan secara langsung melainkan melalui penjajahan teori dan ideologi. Kapitalisme yang memfokuskan pada logika modal dalam lingkaran ilmu ekonomi berusaha mentransformasikan dirinya sebagai ideologi universal di dunia. Pengaruh kapitalisme ini mewabah ke berbagai negara-negara di dunia melalui proses globalisasi yang berawal dari negara-negara Barat.

Globalisasi bisa diartikan sebagai proses integrasi dunia dengan mengikutsertakan ekspansi pasar (barang dan jasa) yang di dalamnya mengandung banyak implikasi bagi kehidupan manusia. Keadaan ini telah berhasil memaksa negara-negara berkembang untuk turut ambil bagian dalam skema besar globalisasi yang hingga kini mendewakan kapitalisme sebagai sistem ekonomi. Globalisasi pada dasarnya merupakan salah satu fase perjalanan panjang perkembangan neoliberalisme. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Mansour Fakih, yaitu "globalisasi adalah proses pengintegrasian ekonomi nasional kepada sistem ekonomi

dunia berdasarkan keyakinan pada perdagangan bebas yang sesungguhnya telah dicanangkan sejak zaman kolonialisme⁴.

Proses dan mekanisme globalisasi bukanlah sebuah keadaan yang bergerak tanpa kemudi. Adanya peran negara-negara maju dalam memproduksi wacana ini dalam bentuk aktor-aktor globalisasi yakni perusahaan transnasional, IMF, dan Bank Dunia⁵. Aktor-aktor globalisasi ini dilandaskan pada ideologi neoliberalisme yang nantinya akan memuluskan jalan kapitalisme untuk menguasai sektor ekonomi.

Dalam perkembangannya kapitalisme memerlukan strategi baru untuk mempercepat pertumbuhan dan 'akumulasi kapital'. Maka strategi yang ditempuh adalah menyingkirkan segenap rintangan investasi dengan pasar bebas, perlindungan hak milik intelektual, good governance, penghapusan subsidi dan program proteksi pada rakyat, deregulasi, dan penguatan civil society dan anti korupsi, dan lain sebagainya. Untuk itu, diperlukan suatu tatanan perdagangan global maka sejak itulah gagasan globalisasi dimunculkan. Dengan demikian, globalisasi pada dasarnya berpijak pada kebangkitan kembali liberalisme, suatu paham yang dikenal sebagai neoliberalisme⁶.

Gagasan neoliberal menuai kemenangannya pada dekade 1980-an pada masa kepemimpinan Ronald Reagan di Amerika Serikat dan Margareth Thatcher di Inggris.

⁴ Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, INSISTPress, Yogyakarta, 2008, hal 211.

⁵ *Ibid*, hal 216.

⁶ *Ibid*, hal 217

Kebijakan dua negara ini menunjukkan gerakan besar dukungan terhadap superioritas pasar yang diperkenalkan melalui rejim internasional (IMF, World Bank, dan WTO), organisasi perdagangan kawasan, maupun lobi-lobi perusahaan multinasional dan transnasional.

Dalam memahami neoliberalisme dengan keterkaitannya terhadap arah politik luar negeri Indonesia dipandang sebagai sebuah rasionalisasi kepentingan nasional. Kemudi politik luar negeri di Era Soekarno yang cenderung Anti-Barat dibelokkan Soeharto atas nama pembangunan untuk menjalin hubungan aktif dengan negara-negara barat yakni Amerika Serikat dan sekutunya. Politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif telah menemukan kebebasannya dalam percaturan politik internasional. Indonesia menjadi sangat pro barat dengan menerima saran-saran pembangunan dari Amerika Serikat dan bantuan hutang luar negeri.

Di Indonesia, periode awal liberalisasi dilakukan pada masa awal pemerintahan Orde Baru yang berlangsung antara tahun 1967-1974⁷. Orde Baru mengeluarkan UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-undang Penanaman Modal Dalam Negeri (UU PMDN). Keberadaan UU ini merupakan langkah awal pemerintah Indonesia membuka kran investasi asing.

Pada tahun 1968, pemerintah kembali mengeluarkan UU 6/1968 untuk memantapkan peran asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada prinsipnya orang asing hanya boleh menguasai sektor-sektor swasta non-strategis dan

⁷ Budi Winarno, *Melawan Gurita Neoliberalisme*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2010, hal 63

penting. Sedangkan untuk sektor strategis, pemerintah memperbolehkan modal asing menguasai 49% pada awal 1968 dan dikurangi hingga 25% pada tahun 1974. Hal ini dikarenakan perekonomian Indonesia yang memburuk pada tahun 1968, sehingga dianggap perlu adanya suntikan dana besar dari investor asing. Periode awal liberalisasi ini menyulut peristiwa Malari pada Januari 1974 sebagai respon terhadap banyaknya investasi asing masuk ke Indonesia.

Periode kedua liberalisasi (1982-1990) dimulai ketika harga minyak jatuh. Keterbatasan dana yang dimiliki pemerintah telah mendorong dilakukannya restrukturisasi ekonomi yang tidak tergantung pada sektor migas dan cenderung menjadi lebih liberal. Hal ini pun turut dipengaruhi oleh adanya perubahan paradigma ekonomi Internasional dimana ideology Kanan Baru telah mulai menyebar dan mulai dominan melalui Washington Consensus.⁸

Akhir tahun 1980an, Indonesia telah meluncurkan serangkaian kebijakan yang ditujukan untuk semakin memperluas basis ekonomi swasta, baik nasional maupun internasional. Kebijakan ini terus berlanjut pada era tahun 1990an saat Indonesia masuk ke dalam organisasi perdagangan dunia WTO (*World Trade Organization*) tepat 1 Januari 1995⁹. Konsekuensi atas masuknya Indonesia ke dalam WTO ini amatlah jelas, yakni secara konsisten harus meliberalisasi perekonomian dalam negeri sesuai dengan mandat yang diberikan oleh WTO.

⁸ *Ibid*

⁹ DEPERINDAG RI, *Kajian Capacity Building Industri Manufaktur Melalui Implementasi Midec-Ijepa*. Jakarta, 2008.

Pada penghujung tahun 1990-an ketika Indonesia mengalami serangkaian krisis moneter, usaha untuk mengintegrasikan diri ke dalam perekonomian global semakin gencar dilakukan. Ini dilakukan sebagai konsekuensi logis utang Indonesia kepada IMF untuk mengatasi krisis moneter yang sedang berlangsung. Indonesia masuk dalam jerat rejim neoliberalisme global dengan adanya ketergantungan terhadap IMF. Bahkan aktivitas neoliberalisme ini cenderung merugikan sektor pertanian Indonesia. Akibatnya membuat Indonesia mengalami ketergantungan baru dalam sektor pertanian. Hegemoni pihak asing telah menempatkan Indonesia dalam keranda pembangunan yang serba ketergantungan terhadap barat.

Dalam memahami arah politik luar negeri Indonesia, Pembukaan UUD 1945 merupakan dasar hukum yang sangat kuat bagi politik luar negeri RI. Alinea I menyatakan bahwa "... kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ..." Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa "... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..." Jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945.

Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikatakan M. Hatta yang mendefinisikan makna politik luar negeri bebas aktif Indonesia dengan mengibaratkan *Mendayung antara Dua Karang* yang artinya adalah upaya aktif untuk tidak terikat oleh dua

kekuatan adikuasa (Amerika Serikat dan Uni Soviet)¹⁰. Pernyataan itu tidak lepas dari kondisi sejarah pada waktu itu yang mempertontonkan kompetisi dua negara tersebut dalam berebut pengaruh dalam kerajaan dunia internasional.

Sejak orde baru hingga reformasi dibawah kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono lajur pemerintahan Indonesia mengalami transisi dari otoriter, semi otoriter hingga menjadi sangat liberal. Indonesia di era presiden SBY dianggap sangat liberal dengan iklim investasi yang sangat terbuka. Hal ini tentunya merupakan sebuah tawaran positif dari ekonom-ekonom yang dulunya menimba ilmu di Universitas Berkeley di California atas beasiswa dari Amerika Serikat (AS). Dengan ideologinya yang sangat liberal, mereka dikenal dengan sebutan "The Berkeley Mafia". Di bawah pengaruh para pengendali ekonomi ini, yang pada gilirannya dikendalikan oleh kekuatan korporasi AS, mereka menuruti praktis apa saja yang dikehendaki oleh pemerintah dan dunia korporat AS, bersama-sama dengan lembaga-lembaga internasional seperti IMF, Bank Dunia, Bank Pembangunan Asia dan IGGI/CGI¹¹.

Suksesi neoliberalisme masuk ke Indonesia tidak hanya mengubah struktur ekonomi domestik tapi juga politik luar negeri. Era reformasi dan orde baru tidak menunjukkan perubahan yang jelas dalam hal politik luar negeri. Indonesia tetap menjalin kemesraan dengan barat demi bantuan dan utang luar negeri dengan

¹⁰ H.M. Sabir., *Politik Bebas Akti,: Tantangan dan Kesempatan*, Haji Masagung, Jakarta, 1987. Hal 17

¹¹ Kwik Kian Gie, *kapiatlisme mekanisme pasar dan peran pemerintah dalam perekonomian dan bisnis*. <http://kwikkiangie.com/v1/2013/02/kapiatlisme-mekanisme-pasar-dan-peran-pemerintah-dalam-perekonomian-dan-bisnis/#more-540>, diakses 7 Maret 2013.

beberapa persyaratan yang harus diterapkan di Indonesia sesuai kehendak barat. Neoliberalisme memasuki mimpi buruk ekonomi Indonesia, dengan doktrinasi ideologi yang sangat kuat.

Politik luar negeri Indonesia pada akhirnya berjalan pada wilayah yang tidak jelas. Suatu kali tampak sangat *low profile*, lain waktu menjadi sangat *assertive* atau *high profile*, bahkan memasuki era Reformasi pasca lengsernya Presiden Soeharti tahun 1988, profil PLNRI dipertanyakan kembali oleh para ahli. Dewi Fortuna Anwar secara normatif menguraikan apa yang *seharusnya* dilakukan oleh PLNRI setelah memasuki era Reformasi. Namun dalam *kenyataannya*, bertahun-tahun setelah itu PLNRI masih banyak dipersoalkan kembali. Mohtar Mas' oed menyebut PLNRI tak konsisten. Budiarto Shambazy menyebutkan bahwa PLNRI menunjukkan profil yang tidak jelas, bahkan disebut tak berprofil (*no profile*). Orientasinya pun dipertanyakan alias mengalami disorientasi Politik luar negeri Indonesia.¹²

Bahkan hingga tahun 2008 profil PLNRI masih dianggap tidak jelas sebagaimana pendapat berikut ini:

*"Gaya politik luar negeri 'no profile' berpola acak mewarnai di semua periode kepemimpinan era Reformasi (sejak Habibie sampai dengan Susilo Bambang Yudhoyono[SBY])," bahkan di masa presiden Abdurrahman Wahid disebut "menabrak semua karang" dan di masa SBY didoktrinasi "mengarungi semua samudera" yang sampai saat ini belum jelas konseptualisasinya, lebih-lebih implementasinya"*¹³

¹² Bambang Wahyu Nugroho, *Tipologi Politik Luar Negeri Indonesia di Era Reformasi*, Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 5 No. 1 April 2012, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm. 66-67

¹³ *Ibid*, hlm. 67

Pada bentuk yang tidak jelas ini, politik luar negeri Indonesia dalam situasi yang hanya mencari posisi aman dengan berbagai langkah kebijakan pragmatis ekonomi. Ketidakjelasan membuat neoliberalisme mudah menggiring arah politik luar negeri Indonesia pada upaya kebijakan strategis yang ditawarkan oleh paham ekonomi barat ini.

Neoliberalisme di Indonesia di era SBY semakin mengukuhkan eksistensi kapitalisme asing untuk terus mengeruk sumber daya alam Indonesia. Sistem kapitalisme ini telah mengubah paradigma ekonomi Indonesia menjadikan pasar sebagai kiblat untuk menjadi keuntungan. Hal ini sesuai dengan apa yang ditawarkan oleh pemikir ekonomi asing bahwa sistim ekonomi yang paling produktif adalah sistim yang ramah pada pasar, sehingga mengubah watak ekonomi Indonesia di era kepemimpinan SBY di Indonesia menjadi *market-friendly*.¹⁴

Pada kampanye Pilpres 2004, SBY juga berjanji pertumbuhan ekonomi rata-rata di atas 6.6%. Sampai tahun 2008, pemerintah SBY-JK hanya mampu meningkatkan pertumbuhan rata-rata 5.9% padahal harga barang dan jasa (inflasi) naik di atas 10.3%. Ini menandakan secara ekonomi makro, pemerintah gagal mensejahterakan rakyat. Pada kampanye Pilpres 2009, SBY juga berjanji akan membuat pertumbuhan ekonomi minimal 7 % sehingga kesejahteraan rakyat meningkat. Janji kampanye SBY ini mendekati keberhasilan karena pertumbuhan

¹⁴ M. Amien Rais, *Agenda Mendesak Bangsa Selamatkan Indonesia!*, PPSK Press, Yogyakarta, 2008, hal 20

ekonomi mencapai kisaran 6 %. Pertumbuhan ekonomi triwulan kedua tahun ini mencapai 6,4 persen dibandingkan dengan periode sama tahun lalu. Secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester I-2012 lebih baik dibandingkan dengan semester I-2011 tumbuh sebesar 6,3 persen. Pertumbuhan PDB pada kuartal kedua tahun 2012 adalah 6,4 persen tahun-ke-tahun, naik sedikit dari 6,3 persen pada kuartal pertama. Menurut Menteri Bappenas Armida Alisyahbana, Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi 6,8 persen pada 2013. Beragam penilaian kritis muncul dari kalangan masyarakat madani dan sektor ekonomi tentang pertumbuhan ekonomi ini.¹⁵

Rezim nasional yang cenderung korporatokrasi ini tidak lagi berkiblat dari pada esensi demokrasi suatu bangsa. Ketergantungan rezim nasional terhadap kekuatan kapital global telah mendorong transfer kekuasaan politik ke tangan kapital finansial. Akibatnya, para bankir, spekulan, investor, dan lembaga keuangan semakin punya kekuasaan yang tak terbatas. Lembaga keuangan dan perdagangan internasional, seperti IMF, Bank Dunia, dan WTO, telah mengambil peran dominan dalam menentukan arah kebijakan ekonomi dan politik di Indonesia.

SBY memandang politik luar negeri Indonesia harus bisa menciptakan peluang-peluang strategis untuk mencapai kepentingan nasional Indonesia. Target SBY semasa pemerintahannya adalah melanjutkan dan meningkatkan pembangunan ekonomi dengan sasaran bisa mencapai pertumbuhan 7 persen atau lebih pada tahun

¹⁵ Muchtar Effendi Harahap, *Pertumbuhan Ekonomi Anomali Dan Kesenjangan Semakin Lebar*, 2012, diakses dari <http://muchtareffendiharahap.blogspot.com/2012/12/pertumbuhan-ekonomi-anomali-dan.html>, pada tanggal 7 Maret 2013.

2014 nanti. Pertumbuhan itu disertai pemerataan, maka dapat digunakan untuk mengurangi kemiskinan, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Dalam mencapai hal tersebut ada 3 solusi yang ditawarkan SBY yakni, pertama, pemerintah bisa mengeluarkan pembiayaan, *government spending*. Kedua, mengundang swasta dalam negeri di pusat atau di daerah. Ketiga, mengundang investor asing dari luar negeri yang disebut dengan penanaman modal asing.¹⁶

Melihat jejak kebijakan politik luar negeri Indonesia yang dibawakan SBY, cukup jelas bahwa yang menjadi target utama adalah pertumbuhan ekonomi melalui pragmatisme ekonomi neoliberal.

D. Rumusan Masalah

Bagaimana pengaruh neoliberalisme terhadap arah kebijakan politik luar negeri Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ?

¹⁶ *Presiden SBY : Politik Luar Negeri Adalah Bagian Dari Upaya Mencapai Kepentingan Nasional*, diakses dari <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2009/11/16/4887.html>, pada tanggal 25 April 2013.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Politik Luar Negeri

Dalam kaitan dengan politik luar negeri, K.J. Holsti, salah seorang pakar Hubungan Internasional dalam bukunya *International Politics: A Framework for Analysis* berpendapat, selain situasi internasional, faktor perilaku pemimpin (policy maker) mempunyai pengaruh yang besar dalam memberi warna terhadap politik luar negeri suatu negara.

Bahkan menurut Holsti, arah kebijakan politik luar negeri suatu negara bisa dipengaruhi oleh aktor non-negara, yakni (1) aktor non-negara yang memiliki wilayah, seperti gerakan pembebasan, (2) organisasi internasional yang tidak memiliki wilayah, seperti perusahaan multinasional, dan (3) berbagai organisasi antarpemerintah, seperti WTO, World Bank, PBB, FAO.¹⁷

Dalam penelitian ini, penulis berusaha menghubungkan peran dan posisi SBY sebagai seorang pemimpin negara dan keterlibatannya dengan aktor non-negara dalam mempengaruhi kebijakan politik luar negeri. Aktor non-negara yang dimaksud adalah perusahaan multinasional dan organisasi antar-pemerintah yang diyakini mampu membentuk logika neoliberalisme dalam tataran kenegaraan.

Kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada peran sentral seorang SBY dibuat cenderung dipengaruhi oleh motif-motif pribadi maupun kelompoknya.

¹⁷ K.J. Holsti., *Politik Internasional Kerangka Untuk Analisis*, Penerbit Erlangga, Jakarta, 1988, hal 75

Kecenderungan seperti ini menurut Hoslti pada dasarnya merupakan manifestasi dari kepribadian (personality) pemimpin yang bersangkutan. Kepribadian itu sendiri adalah kecenderungan psikologik seseorang untuk berperasaan, berkehendak, berfikir, bersikap dan berbuat menurut pola tingkah pekerti tertentu.

Kepribadian tiap-tiap manusia bersifat khas, dan bagi seorang pemimpin, kepribadiannya terutama mewujud dalam gaya kepemimpinan yang khas, seperti kharismatis, pragmatis, demokratis atau otokratis.

Adapun ciri dari seorang pemimpin yang memiliki kepribadian teguh dengan gayanya masing-masing antara lain memiliki rasa percaya diri (self relience) yang tebal, sikap yang tegas dan tindakan yang berani serta memiliki cita-cita atau lebih ekstrim ambisi-ambisi (kepentingan) tertentu.

Sementara itu di beberapa negara menurut K.J. Holsti pemimpin pemerintahan kerap kali menggunakan ideologi sebagai alat pembenar dari tindakan-tindakannya, sekaligus sebagai rasionalisasi dan justifikasi terhadap kebijakan-kebijakan luar negeri yang dibuatnya.

Ideologi secara definitif diartikan sebagai suatu sistem pemikiran mengenai teori politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan, dan sistem pemikiran ini menunjukkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat, di mana masyarakat itu sendiri dipengaruhi oleh hasil pemikiran tersebut.

Oleh karena menyangkut berbagai aspek kehidupan, baik politik, sosial, ekonomi maupun kebudayaan, di dunia ini dikenal bermacam-macam ideologi, antara lain ideologi Komunis, Sosialis, Fascis dan Liberal atau Kapitalis.

Masing-masing ideologi memiliki karakteristik yang berbeda. Ideologi Sosialis misalnya, menekankan aspek pemerataan, sedangkan ideologi Liberal atau Kapitalis menekankan aspek persaingan bebas.

Ideologi demikian pentingnya bagi suatu bangsa, sebab dalam artian yang umum ideologi selalu memuat sistem nilai dengan segala simboliknya yang dianggap transendental dan dijadikan pedoman hidup oleh bangsa yang bersangkutan serta acapkali dijadikan pedoman asasi bagi pelaksanaan politik luar negerinya. Maka, dalam kaitan ini nasionalisme juga bisa dikatakan sebagai suatu ideologi yang bersumber dari ruang kebangsaan domestik Indonesia.

Dalam konteks pengaruh eksternal, neoliberalisme dapat dikatakan berhasil mempengaruhi arah kemudi politik luar negeri Indonesia tanpa harus mengubah esensi ideologisnya. Jika di era sebelum reformasi bisa dilihat fokus PLN Indonesia lebih seimbang antara perdamaian, kesejahteraan sosial, dan ekonomi, namun di era reformasi banyak pihak yang meragukan partisipasi Indonesia dalam bidang perdamaian dan keamanan internasional.

2. Neoliberalisme

Gagasan neoliberalisme lahir dan eksis pada kisaran tahun 1980-an¹⁸ yang merupakan titisan ideologis pendahulunya yakni Liberalisme. Dalam memahami inti dari gagasan neoliberalisme tidak lepas dari spektrum gagasan liberalisme itu sendiri. Kelahiran dan perembangan liberalisme tentu saja tidak dapat dilepaskan dari proses modernisasi yang terwujud dalam semangat *renaissance* yang berlangsung semenjak abad 16 hingga 19 di Eropa. Proses modernisasi ini merupakan sebuah upaya untuk melepaskan diri dari kungkungan dominasi pemikiran dan aturan gereja maupun istana.

Dalam perpektif ekonomi Adam Smith mengembangkan konsep liberalisme ini lewat bukunya, *An Inquiry Into The Nature and Causes Of The Wealth of Nations* (1776),

“Apa yang kita harapkan untuk makan malam kita, tidaklah datang dari keajaiban dari si tukang daging atau tukang roti, melainkan dari apa yang mereka hormati dan kejar sebagai kepentingan pribadi. Malah seseorang umumnya tidak berkeinginan untuk memajukan kepentingan public dan ia juga tidak tahu sejauh mana ia memiliki andil untuk memajukannya. Yang ia hormati dan kejar hanyalah keuntungan bagi dirinya sendiri. Disini ia dituntun oleh tangan-tangan tak terlihat (the invisible hand) untuk mengejar tujuan yang bukan merupakan kehendak sendiri. Bahwa itu juga bukan merupakan bagian dari masyarakat, itu tidak lantas berarti

¹⁸ Budi Winarno, *Melawan, Op.cit.*, pendahuluan

sesuatu yang buruk bagi masyarakat, dengan mengejar kepentingan sendiri, ia kerap kali memajukan kepentingan masyarakat lebih efektif dibandingkan jika ia sungguh-sunggu bermaksud memajukannya. Saya tidak pernah menemukan kebaikan yang dilakukan mereka yang sok berdagang demi kebaikan publik" (Smith, 1937 : 47)¹⁹

Berbeda dengan liberalism klasik abad ke 18 yang bereaksi terhadap kontrol kuat negara atas ekonomi (dalam merkantilisme), neoliberalisme melihat bahwa negara tidak punya alasan apapun juga untuk menjadi tolak ukur semua keberhasilan dan kebijakan negara. Karena itu, bila kebijakan sosial (welfare system) mengganggu kinerja pasar, mereka seharusnya dihapus, atau paling tidak diubah supaya sesuai dengan prinsip pasar bebas²⁰.

Gagasan neoliberalisme tentang pemerintah tidak menghapuskan kekuasaan pemerintah lalu memindahkannya ke tangan individu-individu. Sebaliknya, negara dalam gagasan neoliberal tidak hanya untuk mempertahankan peran tradisionalnya sebagai penjaga malam (seperti dalam liberalism klasik abad ke 18), tetapi juga dibebani tugas baru berupa pengembangan teknik-teknik mengontrol warga, tanpa negara harus bertanggung jawab terhadap mereka, dalam artian masalah sosial seperti pengangguran dan kemiskinan bukan menjadi tanggung jawab negara lagi.

¹⁹ Saiful Arif, *Menolak Pembangunanisme*, Pustaka Pelajar dan PUSPek Averroes Malang, Yogyakarta, 2000, hal 32

²⁰ B. Herry Priyono, *Dalam Pusaran Neoliberalisme*, dalam I. Wibowo dan Francis Wahono, (Ed.), *Neoliberalisme*, Cindelarast Pustaka Rakyat Cerdas, Yogyakarta, 2003, hal.57.

Mengenai neoliberalisme ini, Paul Treanor menjelaskan beberapa karakteristik dari wacana liberalism, yakni sebagai berikut²¹:

“Jika Adam Smith kembali hidup dan melihat beberapa dari banyak aspek ekstrim dari neoliberalisme, ia kemungkinan akan merasa aneh. Meskipun neoliberalisme merupakan turunan dari ide-ide liberalism klasik. Kepercayaan terhadap pasar, terutama pada kekuatan pasar, telah dipisahkan dari produksi faktual barang dan jasa. Kepercayaan tersebut telah berakhir dengan sendirinya dan ini adalah alasan untuk berbicara tentang neoliberalisme bukannya liberalism.”

Karakteristik umum dari neoliberalisme adalah hasrat untuk mengintensifkan dan melebarkan pasar, melalui peningkatan jumlah, frekuensi, perulangan dan perumusan transaksi. Tujuan utama neoliberalisme adalah seluruh dunia dimana setiap tindakan dari setiap makhluk hidup adalah sebuah transaksi pasar, memimpin dalam kompetisi atas setiap individu lainnya dan setiap transaksi lainnya, mempengaruhi transaksi lainnya, dengan transaksi yang terjadi dalam waktu singkat yang tak terbatas dan terjadi berulang-ulang dalam kecepatan yang tidak terukur.

Neoliberalisme dan Liberalisme tidak bisa dipisahkan secara ideologis karena hubungan historis dua gagasan ini sangat terkait meskipun pada intinya terdapat perbedaan maupun persamaannya sebagai berikut²²:

Perbedaan,

²¹ Paul Treanor, Neoliberalisme, diakses dari <http://web.inter.nl.net/users/paul.treanor/neoliberalism.html>, pada tanggal 17 Mei 2013

²² Postinus Gulö, *Apa Itu Neoliberalisme?*, diakses dari <http://postinus.wordpress.com/2008/03/04/apa-itu-neoliberalisme/> pada tanggal 17 Mei 2013

Tabel 1.1 : Perbedaan Neoliberalisme dan Liberalisme Klasik

Liberalisme	Neoliberalisme
<p>1. manusia dianggap sebagai: <i>homo economicus</i></p> <p>2. manusia adalah otonom, bebas memilih</p> <p>3. wacana politik: sosial demokrat dengan argumen, "kesejahteraan"</p> <p>4. Meletakkan kebebasan sebagai nilai politik tertinggi</p> <p>5. Masih mengakui peran kerajaan/pemerintah. Dalam arti sistem kerajaan harus melindungi hak-hak semua rakyat secara adil, bijak dan seksama</p> <p>6. Masih mengakui undang-undang kerajaan (pemerintah). Artinya semua rakyat mempunyai hak-hak yang sama rata di depan hukum dan undang-undang</p>	<p>1. <i>Homo-economicus</i> dijadikan prinsip untuk memahami semua "tingkah laku manusia"</p> <p>2. Hal ini dimodifikasi ke arah yang lebih ekstrem: tidak perlu adanya campur tangan pemerintah, batas negara diterobos</p> <p>3. Wacana politik: sosial ekonomis kapitalis dengan argumen "privatisasi aktivitas ekonomi"</p> <p>4. Meletakkan kebebasan dalam tataran ekonomi, pasar bebas, globalisme</p> <p>5. Lebih ekstrem: sama sekali menolak campur tangan pemerintah, bahkan mereka menghendaki segala macam fasilitas umum seharusnya di swastanisasikan/diprivatisasikan</p> <p>6. Sistem aturan, undang-undang/hukum, ditolak sama sekali, karena hal ini akan menguntungkan pemerintah dan stakeholders lainnya</p> <p>7. Tidak menghendaki peran pemerintah dalam pasar bebas. Sehingga peluang akan adanya</p>

	diskriminasi “terselubung” sangat tinggi (yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin)
--	--

Persamaan,

1. Sama-sama mengutamakan hak-hak individu/pribadi.
2. Sama-sama menghendaki dibatasinya kekuasaan pemerintah/kerajaan, kedaulatan undang-undang.
3. Kebebasan untuk menjalankan perusahaan pribadi tanpa adanya aturan.
4. Administratif yang menghambat aktivitas individu dalam mensejahterakan dirinya.
5. Sama-sama menolak kekuasaan yang otoriter yang mengekang individu.
6. Desentralisasi.

Neoliberalisme selalu membutuhkan suksesi peran internasional agar bisa merambat masuk ke beberapa negara di dunia sebagai ideologi ekonomi politik dominan. Melalui globalisasi, instrumen-instrumen neoliberalisme masuk sebagai pilihan jalan keluar pragmatis dari segala rentetan masalah ekonomi suatu negara. Baik itu dilihat dari kebijakan dalam negeri maupun luar negeri. Tapi bahasan penelitian ini tentu saja menganalisa tentang politik luar negeri.

Pendapat Thomas Friedman sedikit menggambarkan tentang kinerja neoliberalisme dalam politik luar negeri. Dalam kebijakan luar negeri, neoliberalisme mendukung pembukaan pasar luar negeri dengan cara politik, menggunakan diplomasi, tekanan ekonomi dan untuk beberapa negara neoliberal menggunakan kekuatan militer.²³ Berawal dari adanya proses demokratisasi keuangan, investor asing di seluruh dunia dapat menginvestasikan modal mereka di berbagai negara dan perusahaan di seluruh dunia. Kumpulan investor disebut Friedman sebagai '*The Electronic Herd*'. Sehingga negara yang telah membuat sektor swasta mesin utama pertumbuhan ekonomi, mempertahankan tingkat inflasi yang rendah, memiliki birokrasi kecil, telah menghilangkan pembatasan investasi asing, mempromosikan kompetisi domestik. Friedman menyederhanakan gagasannya itu dengan menganalogikan negara sebagai 'komputer'. Suatu negara bisa berhasil berpartisipasi dalam globalisasi, negara harus memiliki perangkat keras (*hardware*) yang tepat dan perangkat lunak (*software*) yang tepat. Perangkat keras yang tepat adalah ekonomi pasar bebas dan perangkat lunak yang tepat meliputi hukum perbankan, hukum komersial, aturan kepailitan, bank sentral independen. Investasi asing dianggap sebagai tonggak pertumbuhan ekonomi yang selalu bergerak cepat.

Hal ini sejalan dengan yang diasumsikan oleh Ade Marup dengan sebutan *state as market apparatus*, yakni ketika negara gagal melakukan intermediasi antara ruang pasar dan kehidupan politik domestik, ketergantungan terhadap struktur modal

²³ Thomas Friedman, *The Lexus and the Olive Tree*, Harper Collins, London, 2000, hlm. 370

internasional akan menyeret suatu bangsa ke dalam wujud aparat pasar.²⁴ Negara menjadikan pusara kapitalisme menjadi ruang penyembahan karena kapitalisme hanya diakomodasi dari wilayah pasar. Di Indonesia, kapitalisme hanya dimasuki dengan dorongan-dorongan ekonomi dan tidak didukung dengan kapasitas-kapasitas struktural yang siap mengkonversi kapitalisme dalam kehidupan politik dan hukum. Fokus pemerintah, yakni menteri keuangan dan menteri luar negeri hanya hanya terlibat dalam ritus peminjaman hutang ke negara dan lembaga donor internasional.

Indonesia di era Presiden SBY, investasi diyakini sebagai sebuah faktor yang sangat penting bagi kemajuan atau kinerja perekonomian suatu negara. Arus investasi atau penanaman modal, baik dari dalam negeri atau dari luar negeri, juga diyakini sebagai sumber pendanaan yang sangat dibutuhkan bagi gerak roda perekonomian. SBY justru bergantung pada kapital asing dan pasar eksternal. Pertumbuhan ekonomi kita yang rata-rata di atas 6% tiap tahun itu, yang selalu dibangga-banggakan oleh SBY, benar-benar ditopang oleh faktor eksternal: investasi asing, utang luar negeri, dan ekspor bahan mentah. Tidak heran, supaya pertumbuhan tinggi dengan tiga penopangnya itu tetap tetap terjaga, SBY berusaha semaksimal mungkin mencitrakan Indonesia sebagai negara yang ramah terhadap investasi asing.

F. Hipotesis

²⁴ Ade Marup W., *Negara, Pasar dan Labirin Demokrasi*, The Phinisi Press, Yogyakarta, 2013, hlm.

Berdasarkan kerangka teoritik yang telah dibangun di awal, maka penulis menduga peran neoliberalisme berpengaruh dalam pembentukan arah politik luar negeri Indonesia. Hubungan kerja sama Indonesia baik bilateral, regional, maupun multilateral mengarah pada beberapa hal berikut, *Pertama*, neoliberalisme mengubah Arah politik luar negeri Indonesia dengan lebih mengedepankan diplomasi ekonomi daripada isu-isu lain luar negeri seperti HAM, Keamanan dan Perdamaian lain-lain. memprakarsai dan mengikuti forum ekonomi yang berkiblat pada aturan neoliberalisme. *Kedua*, kerjasama indonesia baik bilateral maupun multilateral lebih ke arah pragmatisme ekonomi dengan memfokuskan pada promosi salah satu pilar neoliberalisme yakni *Foreign Direct Investment* dan perdagangan bebas.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deduktif yang dibangun melalui argumen dasar teori kemudian membentuk hipotesa sederhana akan kajian permasalahan yang hendak dijelaskan hingga nanti menuju syarat pembuktian sebuah jawaban permasalahan. Jenis penelitian ini tentu saja lebih memfokuskan pada bentuk deskriptif analitif, yakni adanya pengukuran cermat terhadap fenomena-fenomena sosial yang sedang berlangsung dengan memusatkan fokus kajian pada isu-isu aktual. Proses interpretasi dalam memandang problematika utama penelitian ini tentu saja tidak mengesampingkan aktivitas *heuristik* yakni dengan turut melibatkan pengumpulan sumber atau fakta sejarah yang mendukung tema penulisan. Proses

deskriptif ini akan menggabungkan fakta-fakta yang ditemukan dengan nalar konstruktif penulis untuk menjawab pokok permasalahan yang telah dibangun di awal.

Dalam pengumpulan data penulis akan menggunakan data sekunder dengan lebih memusatkan perhatian pada studi pustaka melalui bahan-bahan referensi yang meliputi buku-buku, jurnal ilmiah, Koran, majalah, media internet, dan berbagai sumber lain terkait dengan permasalahan yang hendak dikaji. Data-data yang diperoleh akan melalui proses pembuktian analitis penulis agar bias dipastikan keakuratan dan kepercayaannya tersebut sehingga mampu membangun konstruksi kajian permasalahan menjadi lebih kokoh.

H. Sistematika Penulisan

Sebuah karya penelitian ilmiah harus melalui proses penelaahan yang sistematis untuk menemukan kesimpulan objektif kajian yang hendak dibahas. Pentingnya sistematika penulisan untuk mengarahkan fokus kajian agar tetap berada dalam wilayah yang seharusnya agar tidak terlalu general ataupun bias makna dari tema yang diangkat. Adapun sistematika pembahasan dari skripsi ini adalah:

Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini, penulis menuliskan berbagai aktivitas metodologis penelitian sebagai pijakan untuk meneliti problematika terkait yakni Alasan Pemilihan Judul,

Tujuan, Latar Belakang, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Penelitian, Hipotesa, Metode Penelitian.

Bab II : Peranan Gagasan Neoliberalisme dalam Dunia Internasional

Dalam bab ini akan digambarkan mengenai perjalanan neoliberalisme secara historis sehingga bisa menjadi ideologi dominan di beberapa negara di dunia. Proses globalisasi neolib yang masuk ke Negara-negara dunia ketiga akan dinilai baik buruknya. Bab ini menjadi pembuktian apakah neolib mencapai sebuah peluang atau ancaman di beberapa Negara berkembang. Serta perbandingannya dengan negara maju.

Bab III : Perjalanan Politik Luar Negeri Indonesia Sejak Orde Lama hingga Reformasi

Pada bab ini penulis berusaha mendeskripsikan arah kebijakan politik luar negeri Indonesia selama periode pemerintahan orde baru hingga reformasi. Penulis kemudian akan membandingkan antara kebijakan politik luar negeri Indonesia yang berlaku di masing-masing periode pemerintahan.

Bab IV : Arah Politik Luar Negeri Indonesia dalam Dinamika Perkembangan Ekonomi Global

Dalam bab IV ini penulis berusaha mendeskripsikan sejauh mana peran dan pengaruh neoliberalisme mengubah arah politik luar negeri Indonesia baik itu tataran

regional maupun internasional. Dalam deskripsi berikutnya, akan ditelaah lebih lanjut dampak dari adanya gagasan neoliberalisme terhadap politik luar negeri Indonesia yang lebih bermuara pada pragmatisme ekonomi, pembangunan, dan eksistensi bangsa di mata internasional dengan mengkampanyekan iklim investasi di Indonesia. Selain itu juga intensitas aktivitas politik luar negeri Indonesia dalam beberapa kegiatan forum ekonomi.

Bab V : Penutup

Pada bab terakhir ini penulis akan membuat argumen simpulan dari temuan-temuan fakta yang diperoleh dari berbagai pembahasan dan menjadi jawaban pembuktian atas anggapan sementara yang telah dibangun di awal.